

**PENGARUH KARAKTERISTIK SASARAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;
BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SUKMA BAYU AJI

B 200 040 256

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba, mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif misalnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan.

Penilaian kinerja terhadap lembaga dan organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauhmana pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (BUMN). Yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan keluarnya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam pengembangan kebijakan ini memperbaharui dan dikeluarkannya UU

No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU no 32 tahun 2004 sebagai revisi UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menetapkan bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan, maka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi.

Selain itu Undang-undang No 33 tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan keuntungan atau otonomi yang luas, nyata dan pertanggung jawaban pemerintah daerah secara proposional. Lebih jauh lagi (Patty: 2006: 1), mengemukakan beberapa undang – undang diatas telah merubah setting model manajemen dan control keputusan dipemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada saat ini kepala daerah bukan satu – satunya pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap keberadaan organisasi pemerintah daerah, tepi terdapat berbagai pihak yang juga merupakan stakeholder kunci seperti Kepala Badan Dinas, Kantor dan unit lainnya. Keterlibatan pihak – pihak ini dalam pengelolaan keuangan daerah diperlakukan sebagai pihak yang paling penting dalam mencapai tingkat Survival Organisasi pemerintah daerah, baik berkaitan dengan tingkat efisiensi, efektifitas, mupun kinerja organisasi pemerintah daerah secara keseluruhan sangat bergantung pada manajemen tingkat Badan, Dinas, Kantor dan Unit lainnya. Sebagai contoh dalam UU no. 33 / 2004, ps. 372 dan PP

No. 58/ 2005, ps. 36 dinyatakan bahwa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bisa Badan, Dinas, Kantor dan Unit lainnya, harus menyusun Rencana kerja dan Anggaran (RKA SKPD).

Karakteristik sasaran anggaran merupakan komponen-komponen yang berperan serta dalam mewujudkan tersusunnya suatu rencana keuangan baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif, menurut Kenis (1979) penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan lima dimensi karakteristik sasaran anggaran yaitu : partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran.

Hasil penelitian Supriyono (2004), Coryanata (2004) dan Sardjito dan Muthaher (2007) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian Darma (2004) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Sandi (2007) dari dimensi karakteristik anggaran hanya variabel partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Begitupula dengan hasil penelitian Kurnia (2005) karakteristik sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hasil penelitian yang tidak konsisten menunjukkan adanya faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan karakteristik sasaran anggaran

dengan kinerja manajerial. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut adalah budaya organisasi. Hasil penelitian Sardjito dan Muthaher (2007) menunjukkan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Jika budaya suatu negara mempengaruhi keefektifan penganggaran, maka budaya organisasi di Indonesia yang masih sangat kuat dapat pula mempengaruhi proses penganggaran.

Selain budaya organisasi, komitmen organisasi juga dapat mempengaruhi hubungan karakteristik sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Manager yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja (Sardjito dan Muthaher, 2007). Hasil penelitian Coryanata (2004) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan kontinjensi untuk menggabungkan faktor kondisional dengan fokus penelitian pada budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antara karakteristik sasaran anggaran dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Pemda Kabupaten Pekalongan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ?
2. Apakah tingkat kesesuaian antara kelima komponen karakteristik sasaran anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran dan budaya organisasi akan meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)?
3. Apakah tingkat kesesuaian antara kelima komponen karakteristik sasaran anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran dan komitmen organisasi akan meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik sasaran anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesesuaian antara kelima komponen karakteristik sasaran anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesesuaian antara kelima komponen karakteristik sasaran anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran

anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara umum dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian yang akan datang dengan materi yang sama.

Bagi pejabat struktural di pemerintah daerah, untuk menelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan kinerja manajerial.